

Krisis Substansi Demokrasi di Balik Proseduralisme Politik Indonesia Pasca Reformasi

Adi Pratama¹

Lavega Putri Prestanto²

M.Iniat Arfan Dildar³

Raisa Rahmala Putri⁴

Rudi Santoso⁵

Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung, Indonesia

adipratama7839@gmail.com¹

lavegaprestanto@gmail.com²

arpanmuhammad1121@gmail.com³

raisarahmala01@gmail.com⁴

rudisantoso@radenintan.ac.id⁵

Abstrak

Pasca Reformasi 1998, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek prosedural demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif rutin, keterbukaan politik, serta desentralisasi kekuasaan. Meskipun demikian, penguatan prosedur tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas substansi demokrasi. Fenomena ini terlihat dari masih dominannya praktik politik transaksional, menguatnya peran oligarki, serta terbatasnya representasi kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan antara demokrasi prosedural dan substansial dalam konteks politik Indonesia pasca-Reformasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Analisis difokuskan pada dinamika kekuasaan, relasi antara elite politik dan ekonomi, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung beroperasi pada tataran formal-prosedural, sementara nilai-nilai substantif seperti keadilan sosial, partisipasi bermakna, dan akuntabilitas publik belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini mengindikasikan adanya distorsi dalam praktik demokrasi yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan demokrasi substantif melalui reformasi kelembagaan, peningkatan partisipasi publik yang berkualitas, serta pembatasan pengaruh kekuatan oligarkis dalam politik.

Kata Kunci:

Demokrasi Prosedural, Demokrasi Substantif, Oligarki, Pasca-Reformasi, Politik Indonesia

Abstract

Following the Reformasi 1998, Indonesia has experienced significant progress in the procedural aspects of democracy, including the regular conduct of elections, increased political openness, and decentralization of power. However, these procedural advancements have not necessarily been accompanied by improvements in the substantive quality of democracy. This condition is reflected in the persistence of transactional politics, the strengthening of oligarchic influence, and the limited representation of public interests in policymaking processes. This study aims to examine the imbalance between procedural and substantive democracy in post-Reform Indonesia using a qualitative approach based on literature review. The analysis focuses on power dynamics, the relationship between political and economic elites, and their implications for democratic quality. The findings indicate that democracy in Indonesia tends to operate at a formal-procedural level, while substantive values such as social justice, meaningful participation, and public accountability remain insufficiently realized. This suggests the presence of distortions in democratic practice that may hinder healthy democratic consolidation. Therefore, strengthening substantive democracy requires institutional reforms, improved quality of public participation, and limitations on oligarchic influence in politics.

Keyword:

Oligarchy, Political Indonesia, Post-Reform, Procedural Democracy, Substantive Democracy

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Sejak Reformasi 1998, Indonesia sering dipandang sebagai salah satu contoh penting dalam proses transisi menuju sistem demokrasi di Asia Tenggara (Nurchaya et al., 2025). Perubahan politik yang terjadi tidak hanya menandai berakhirnya rezim otoritarian, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan institusi-institusi demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilihan umum yang berlangsung secara reguler, desentralisasi kewenangan ke tingkat daerah, serta meningkatnya ruang kebebasan sipil kerap dijadikan indikator keberhasilan tersebut. Namun, jika dicermati lebih jauh, keberhasilan ini cenderung berada pada level prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi yang substantif (Noer, 2025a).

Dalam praktiknya, demokrasi pasca-Reformasi menunjukkan sejumlah dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip ideal demokrasi itu sendiri (Erlina, 2023). Alih-alih menghasilkan distribusi kekuasaan yang lebih merata, sistem demokrasi justru dalam beberapa kasus menjadi medium bagi bertahannya pola-pola kekuasaan lama dalam bentuk yang lebih fleksibel. Hal ini tampak dari masih kuatnya pengaruh kelompok elite dalam proses politik, baik melalui kontrol terhadap sumber daya ekonomi maupun akses terhadap institusi politik. Dengan demikian, demokrasi tidak selalu berfungsi sebagai mekanisme representasi kepentingan publik secara luas, melainkan dapat beroperasi dalam kerangka kepentingan yang lebih sempit (A.-S. Abdullah, 2022; Pebriansah, 2023).

Selain itu, praktik klientelisme dan patronase tetap menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari dinamika politik elektoral di Indonesia (Kusmana & Mustofa, 2024). Hubungan antara aktor politik dan pemilih sering kali dibangun atas dasar pertukaran yang bersifat pragmatis, bukan pada pertimbangan programatik atau ideologis. Fenomena politik uang juga memperlihatkan bahwa kompetisi elektoral tidak sepenuhnya berjalan dalam kerangka rasionalitas demokratis yang ideal (Rizqillah et al., 2025). Dalam konteks desentralisasi, distribusi kekuasaan ke daerah tidak selalu memperkuat partisipasi politik masyarakat, tetapi dalam beberapa kasus justru menciptakan ruang baru bagi praktik dominasi elite di tingkat lokal.

Meskipun berbagai kajian telah mengangkat persoalan-persoalan tersebut, sebagian besar masih melihatnya sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Pendekatan yang terfragmentasi ini membuat hubungan antara berbagai gejala tersebut belum sepenuhnya terjabarkan dalam satu kerangka analisis yang utuh (Abdillah et al., 2026). Akibatnya, belum banyak penelitian yang secara langsung menyoroti bagaimana dominasi proseduralisme dalam demokrasi dapat berkontribusi terhadap melemahnya dimensi substansial demokrasi itu sendiri (Noer, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kembali praktik demokrasi di Indonesia dengan menempatkan proseduralisme sebagai titik masuk analisis. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana mekanisme demokrasi yang secara formal berjalan dengan baik justru dapat menyembunyikan atau bahkan memperkuat distorsi dalam praktik kekuasaan (N. Sari et al., 2025). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini berusaha menghubungkan berbagai temuan yang ada ke dalam kerangka analisis yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami krisis substansi demokrasi sebagai konsekuensi dari dominasi proseduralisme dalam praktik politik (A. Abdullah, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana proseduralisme politik di Indonesia pasca-Reformasi berimplikasi terhadap kualitas demokrasi secara substantif, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi arah perkembangan demokrasi ke depan.

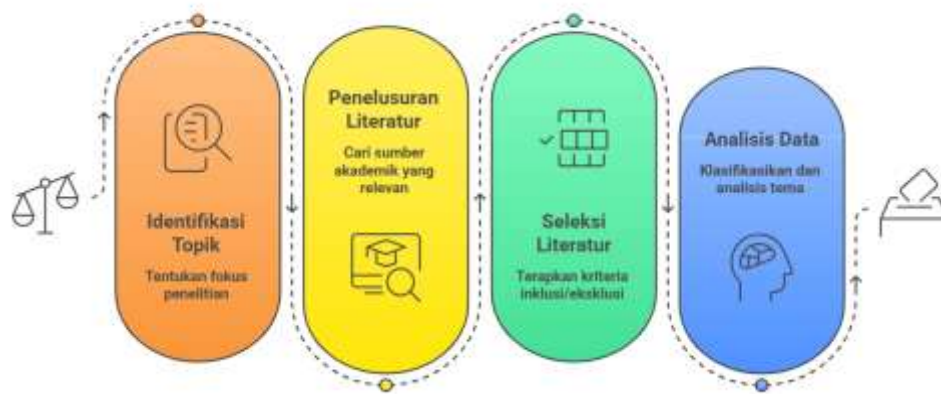
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*library research*) untuk memahami dinamika demokrasi di Indonesia pasca Reformasi 1998. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara kritis berbagai temuan yang telah dipublikasikan, khususnya terkait hubungan antara proseduralisme politik dan kualitas substansi demokrasi.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan penelitian yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan demokrasi Indonesia, praktik politik, serta relasi kekuasaan. Untuk menjaga relevansi dan kualitas, hanya sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik serta memiliki kejelasan akademik yang digunakan dalam analisis.

Pemilihan literatur dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, periode publikasi, serta kredibilitas sumber. Literatur yang tidak memiliki dasar metodologis yang jelas atau tidak relevan dengan fokus penelitian tidak dilibatkan dalam proses analisis.

Alur penelitian disajikan dalam Gambar 1 yang menggambarkan tahapan utama penelitian secara sistematis.



Gambar 1. Alur Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi topik untuk menetapkan fokus kajian. Selanjutnya dilakukan penelusuran literatur guna mengumpulkan sumber-sumber akademik yang relevan. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga hanya sumber yang sesuai yang digunakan. Tahap berikutnya adalah analisis data, yang dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama dan mengkaji hubungan antar temuan tersebut. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Seluruh tahapan dilakukan secara berurutan dan saling berkaitan, sehingga memungkinkan proses penelitian dapat ditelusuri dengan jelas. Pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu memberikan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap dinamika demokrasi yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran dan pengolahan literatur menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 memperlihatkan kecenderungan penguatan pada dimensi prosedural. Hal ini ditandai oleh berlangsungnya pemilihan umum secara periodik, terbukanya kompetisi politik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik formal. Selain itu, perubahan kelembagaan melalui desentralisasi turut memperluas distribusi kewenangan politik ke tingkat daerah.

Meskipun demikian, temuan yang diperoleh tidak sepenuhnya menunjukkan adanya perbaikan yang seimbang pada aspek substansial demokrasi. Dalam berbagai sumber yang dianalisis, praktik demokrasi formal justru berjalan berdampingan dengan pola relasi kekuasaan yang relatif bertahan (Raintung & Mesra, 2025). Proses elektoral tidak selalu menjadi ruang pertarungan gagasan yang setara, melainkan sering kali dipengaruhi oleh faktor di luar mekanisme demokrasi normatif.

Kecenderungan tersebut juga tercermin dalam menguatnya praktik politik yang bersifat transaksional. Relasi antara aktor politik dan pemilih dalam sejumlah kasus tidak sepenuhnya dibangun atas dasar pertimbangan program atau visi kebijakan, melainkan lebih didorong oleh kepentingan jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tetap berlangsung, tetapi orientasinya mengalami pergeseran.

Selain itu, distribusi kekuasaan melalui kebijakan desentralisasi tidak selalu menghasilkan perubahan yang substantif dalam praktik politik. Dalam beberapa konteks, pelimpahan kewenangan justru menciptakan konfigurasi kekuasaan baru di tingkat lokal tanpa mengubah pola dominasi yang telah ada sebelumnya (Budiman et al., 2025). Dengan demikian, perubahan pada struktur kelembagaan tidak secara otomatis diikuti oleh perubahan dalam relasi kekuasaan.

Untuk memperjelas pola temuan tersebut, hasil penelitian dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Temuan Penelitian

Aspek Demokrasi	Temuan Utama	Implikasi
Prosedural	Pemilu berlangsung rutin, partisipasi meningkat	Demokrasi stabil secara formal

Substansial	Representasi dan akuntabilitas belum optimal	Kualitas demokrasi belum merata
Praktik Politik	Menguatnya pola transaksional dalam relasi politik	Pergeseran orientasi politik
Relasi Kekuasaan	Dominasi kelompok tertentu tetap terlihat	Ketimpangan kekuasaan bertahan
Desentralisasi	Distribusi kewenangan tidak selalu mengubah praktik kekuasaan	Munculnya konsentrasi kekuasaan lokal

Sumber: hasil sintesis peneliti

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang dengan fondasi prosedural yang relatif mapan, namun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kualitas substantif yang lebih mendalam.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia pasca Reformasi berkembang dalam dua kecenderungan yang tidak sepenuhnya sejalan. Di satu sisi, terdapat penguatan yang jelas pada aspek prosedural, yang ditandai oleh berfungsinya institusi-institusi formal demokrasi. Di sisi lain, dimensi substansial justru menunjukkan dinamika yang lebih kompleks dan belum sepenuhnya mengalami penguatan yang signifikan.

Kondisi ini mengarah pada situasi di mana demokrasi beroperasi secara formal, tetapi belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi representatifnya secara optimal. Mekanisme seperti pemilihan umum memang menyediakan ruang partisipasi, namun ruang tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kondisi yang setara (Arifany et al., 2024; D. P. Sari et al., 2025). Perbedaan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi menciptakan ketimpangan dalam proses kompetisi, sehingga hasil yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kepentingan publik secara luas.

Praktik politik transaksional menjadi salah satu indikator penting dalam memahami fenomena ini. Ketika relasi politik dibangun atas dasar pertukaran kepentingan jangka pendek, maka orientasi demokrasi mengalami pergeseran dari yang semula bersifat programatik menjadi lebih pragmatis. Dalam kondisi tersebut, demokrasi tetap berjalan sebagai prosedur, tetapi kehilangan sebagian dari fungsi substantifnya sebagai sarana artikulasi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya ambivalensi. Secara normatif, desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan kekuasaan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya, pelimpahan kewenangan tidak selalu diikuti oleh redistribusi kekuasaan yang lebih merata. Dalam beberapa kasus, kekuasaan justru terkonsentrasi pada aktor-aktor lokal tertentu yang mampu menguasai sumber daya politik di daerah.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa krisis substansi demokrasi tidak disebabkan oleh ketiadaan institusi demokrasi, melainkan oleh keterbatasan dalam fungsi dan praktiknya. Demokrasi hadir sebagai sistem yang berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan politik, representasi yang inklusif, serta partisipasi yang bermakna.

Dengan demikian, penguatan demokrasi di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan aspek formal, tetapi juga memerlukan upaya yang lebih mendalam untuk memperkuat dimensi substantif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas representasi politik, penguatan akuntabilitas publik, serta pembatasan pengaruh kekuatan ekonomi dalam proses politik. Tanpa upaya tersebut, demokrasi berpotensi tetap stabil secara prosedural, tetapi tidak berkembang secara substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia pasca Reformasi 1998 mengalami penguatan yang cukup signifikan pada aspek prosedural, yang ditandai oleh berfungsinya mekanisme formal seperti pemilihan umum, keterbukaan politik, dan desentralisasi kekuasaan. Namun, penguatan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh perkembangan yang seimbang pada dimensi substansial demokrasi. Hasil analisis mengindikasikan bahwa praktik demokrasi masih diwarnai oleh berbagai dinamika yang membatasi kualitas representasi dan akuntabilitas publik. Menguatnya praktik politik transaksional, bertahannya dominasi kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan,

serta ambivalensi dalam pelaksanaan desentralisasi menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan politik dan partisipasi yang bermakna. Dengan demikian, krisis substansi demokrasi di Indonesia dapat dipahami sebagai konsekuensi dari dominasi proseduralisme dalam praktik politik. Demokrasi cenderung berjalan sebagai sistem formal yang stabil, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan publik secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk memperkuat dimensi substantif demokrasi, tidak hanya melalui perbaikan kelembagaan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas partisipasi politik, penguatan akuntabilitas, serta pembatasan pengaruh kekuatan yang berpotensi mendistorsi proses demokrasi. Dengan langkah tersebut, demokrasi di Indonesia diharapkan tidak hanya mapan secara prosedural, tetapi juga memiliki kedalaman substantif yang lebih kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. R., Putri, R., & Siswanto, A. H. (2026). Mengatasi Kesenjangan Epistemik Dakwah melalui Pendekatan Sosiologi: Model Intervensi Transformasional Berbasis Analisis Struktur–Agen dalam Konteks Fragmentasi Sosial Kontemporer: Overcoming Epistemic Gaps in Da'wah through a Sociological Approach: A Transformational Intervention Model Based on Structure-Agency Analysis in the Context of Contemporary Social Fragmentation. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 25–53.
- Abdullah, A. (2025). Reformasi Hukum dalam Cengkeraman Oligarki: Menelusuri Kesenjangan Legitimasi Konstitusional dan Kepentingan Elite. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(01), 85–100. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1353>
- Abdullah, A.-S. (2022). Fādil Al-Samarra'ī's Contribution to Literary and Rhetorical Exegesis of the Qur'an. *Religions*, 13(2), 180. <https://doi.org/10.3390/rel13020180>
- Arifany, E. A., Ikhwan, F. P., & Rajasyah, M. A. (2024). Hambatan dan tantangan dalam pemilihan umum (PEMILU): Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih. *Humani*, 1(1). <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/3>
- Budiman, Daswati, & Alamsyah, M. N. (2025). Pola Dan Dominasi Kekuasaan Oligarki Lokal Pada Industri Pertambangan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 13(2), 131–147. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v13i2.16368>
- Erlina, F. (2023). Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(2), 200–220. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (IJPP)*, 6(1), 30–41.
- Noer, H. H. (2025a). Patologi Kelembagaan Demokrasi Elektoral: Korupsi Politik Di Indonesia Pasca-Reformasi. *Aegis : Journal of International Relations*, 9(1). <https://doi.org/10.33021/aegis.v9i1.6285>
- Noer, H. H. (2025b). Patologi Kelembagaan Demokrasi Elektoral: Korupsi Politik Di Indonesia Pasca-Reformasi. *Aegis : Journal of International Relations*, 9(1). <https://doi.org/10.33021/aegis.v9i1.6285>
- Nurchaya, Y., Putra, R. A., Murni, F. E. D., Negara, T. N., & Sugiarto, D. (2025). Jejak Islam Dan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Konteks Politik Asia Tenggara. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(2), 225–236. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v21i2.38496>
- Pebriansah, M. (2023). Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Legislasi Indonesia: Implikasi Hukum. *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.53611/vd26ke12>
- Raintung, A., & Mesra, R. (2025). Hubungan Penguasa dan Pengusaha (Kajian Sosiologi Politik dan Demokrasi). *Etic (Education And Social Science Journal)*, 2(4), 364–376. <https://doi.org/10.64924/s9fmxd71>

- Rizqillah, R., Daryono, D., & Aziz, A. N. (2025). Pelanggaran Elektoral Dan Erosi Demokrasi: Peran Money Politic Dalam Menghancurkan Nilai-Nilai Demokrasi. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 24(3), 840–858.
- Sari, D. P., Rahman, M. H. T., & Hafani, M. H. (2025). Keseimbangan antara Efisiensi, Demokrasi, dan Amanat Konstitusi Dalam Rekonstruksi Sistem Pemilihan Kepala Daerah. *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 62–76. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i1.683>
- Sari, N., Olivia, V. K., Zahra, M. A. L., Dava, V. M., & Putra, D. R. (2025). Demokrasi Dan Supremasi Hukum. *LintekEdu: Jurnal Literasi dan Teknologi Pendidikan*, 6(4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jltp/article/view/4014>.